



TAHUN
2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGANYAR

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	2
C. Permasalahan / Isu Strategis	3
BAB II Perencanaan Strategis	4
A. Rencana Strategis	4
B. Rencana Kegiatan	7
C. Perjanjian Kinerja	11
BAB III Akuntabilitas Kinerja	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran dan Efisiensi	41
C. Pendapatan Asli Daerah	43
BAB IV Penutup	42
A. Simpulan Umum dan Capaian Kinerja	42
B. Tindak Lanjut dan Rekomendasi	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	4
Tabel 2.2 Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2021	7
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja	12
Tabel 2.4 Rencana Kerja Anggaran	14
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja	24
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja	25
Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan / Sasaran 1	26
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan / Sasaran 2	28
Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan / Sasaran 3	32
Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	35
Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020 dan 2021	38
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan Target Tahun 2023	40
Tabel 3.9 Anggaran Biaya.....	41
Tabel 3.10 Pendapatan Asli Daerah	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Kepegawaian 2

Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 ... 26

Gambar 3.2 Sosialisasi Informasi Pasar Kerja 28

Gambar 3.3 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 28

Gambar 3.4 Pengawasan Koperasi dan Penyusunan NIK 32

Gambar 3.5 Fasilitasi Penilaian Kesehatan Koperasi 35

Gambar 3.6 Fasilitasi Penyediaan Sarana Perdagangan 35

Gambar 3.7 Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020
dan 2021 39

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Karunia-Nya sehingga penyusunan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah” Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kebijakan dan program yang dijabarkan melalui kegiatan, sekaligus merupakan wujud tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam laporan ini sekaligus mencakup evaluasi yang dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Karanganyar, Januari 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KARANGANYAR

MARTADI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19650323 198908 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Tugas Pokok Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Fungsi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah serta transmigrasi.
- b. Perumusan perencanaan bidang teknis bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah serta transmigrasi.
- c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah serta transmigrasi,
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah serta transmigrasi,
- e. Pelaksaan fungsi kesekretariatan dinas,
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unt pelaksana teknis dinas,
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1

Struktur Kepegawaian

B. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Usaha Kecil dan Menengah mempunyai aspek strategis sebagai berikut :

- a. Sebagai instansi yang dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan menggandeng lembaga-lembaga keterampilan dalam penyediaan akses dan mutu pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi.

- b. Peningkatan jaringan teknologi informasi sampai wilayah terjauh dan terdalam dalam mendukung perkembangan produk dan informasi pemasaran secara digital.
- c. Peningkatan investasi untuk menghadirkan industri baru yang memberikan peluang besar dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
- d. Memperluas jaringan pasar kerja di luar negeri
- e. Memperluas pusat-pusat perdagangan di wilayah kecamatan
- f. Meningkatkan nilai tambah produk dalam meningkatkan laju ekspor produk unggulan daerah yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan produk dari luar.
- g. Menciptakan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja internasional.
- h. Menciptakan pelaku UKM yang bertalenta dalam menghadapi persaingan bisnis di era digital.

C. Permasalahan/Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- 1 Masih kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan, penyediaan tenaga kerja terampil, sarana dan prasarana peningkatan kapasitas tenaga kerja dan lembaga pelatihan kerja yang berkualitas.
- 2 Masih terjadinya perselisihan antara tenaga kerja dengan industri yang mengganggu hubungan industrial.
- 3 Belum berkembangnya kualitas koperasi dan belum optimalnya perkembangan dan pembinaan usaha mikro dalam mendukung ekonomi kerakyatan.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. Rencana Strategis

Rencana Strategi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memuat tujuan, sasaran, strategis serta arah kebijakan yang ditetapkan untuk menjamin pencapaian indikator kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 2.1

Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya pelayanan calon tenaga kerja	▪ Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan kerja pada masyarakat dengan status pengangguran dan pengembangan kapasitas pada angkatan kerja yang belum terampil tetapi sudah bekerja. ▪ Peningkatan kapasitas ataupun daya tampung BLK dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.	▪ Pendidikan dan pelatihan pencari kerja fokus kerjasama dengan LPK-LPK yang menjadi binaan pemerintah daerah. ▪ Melakukan setrifikasi tenaga kerja sesuai keahliannya yang dibutuhkan oleh dunia usaha. ▪ Melakukan kemitraan dengan perusahaan di daerah yang membutuhkan tenaga kerja terampil. ▪ Peningkatan pengawasan ketenagakerjaan terutama dalam menjamin perlindungan tenaga kerja daerah.
Meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM	Meningkatnya pengelolaan kelembagaan koperasi yang berkualitas dan	▪ Meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi melalui peningkatan kapasitas SDM koperasi, baik melalui pelatihan	▪ Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi difokuskan pada Koperasi sehat dan aktif ▪ Penyederhanaan jumlah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	pertumbuhan usaha mikro	maupun bimbingan teknis dan manajemen koperasi. ▪ Peningkatan kualitas pemantauan melalui penilaian pada seluruh koperasi yang ada di Karanganyar untuk menentukan penghapusan atau perbaikan manajemen pada koperasi itu sendiri. ▪ Peningkatan kemampuan permodalan koperasi melalui berbagai kegiatan fasilitasi dan sarasehan dengan manajemen koperasi bersama investor-investor potensial.	kope.rasi berdasarkan hasil penilaian dengan fokus pada penghapusan kopeasi yang sudah tidak aktif selama 5 tahun. ▪ Peningkatan sistem monitoring perkembangan koperasi dengan menerapkan NIK pada setiap koperasi. ▪ Menjalin kerjasama dengan pihak perbankan dalam meningkatkan kemampuan permodalan koperasi.
		▪ Mendorong peningkatan status usaha mikro ke kecil melalui pembinaan terhadap kelompok usaha mikro dan melakukan skala prioritas pada usaha mikro yang berada pada kelompok klaster. ▪ Peningkatan kemampuan usaha usaha mikro melalui fasilitasi peralatan, permodalan dan peningkatan keterampilan pelaku usaha mikro.	▪ Peningkatan kualitas sumber daya manusia ▪ Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan ▪ Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; d. Penguatan kelembagaan usaha ▪ Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
Meningkatnya produktivitas Sektor Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan	▪ Penyediaan sarana Prasarana perekonomian wilayah yang baik melalui pembangunan sarana prasarana (pasar	▪ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan yang difokuskan pada pemenuhan sarana dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		kabupaten) yang layak	prasarana pasar tradisional. ▪
		▪ Peningkatan produktivitas sektor perdagangan melalui peningkatan sarana prasarana perdagangan (pasar rakyat yang berkualitas), peningkatan pengawasan produk perdagangan, peningkatan pengawasan alat ukur melalui tera dan tera ulang, peningkatan kapasitas pedagang.	▪ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan yang difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana pasar tradisional ▪ Peningkatan kualitas pengawasan produk perdagangan, dan alat ukur timbangan. ▪ Perluasan penataan PKL pada wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi kegiatan pariwisata dan perdagangan
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah	▪ Meningkatkan kinerja Sekretariat melalui dukungan Admnistrasi ▪ Meningkatkan sarana dan prasarana ▪ Meningkatkan kemampuan aparatur yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelaporan melalui peningkatan kapasitas Aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan	▪ Menciptakan upaya – upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat yang memadai dalam menunjang kegiatan kinerja Dinas yang dilandasi dengan komitmen dalam rangkamewujudkan tujuan dan sasaran ▪ penyediaan sarana dan fasilitas ▪ Mengadakan dan mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai

B. Rencana Kegiatan

Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah akan diwujudkan dalam program dan kegiatan di tahun 2021 sebagaimana berikut.

Tabel. 2.2
Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan
Meningkatkan kualitas perencanaan , pengendalian, dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dn menengah	Meningkatnya kinerja perencanaan , pengendalian, dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, tenaga kerja,koperasi usaha kecil dan menengah	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		Penyediaan jasa kebersihan kantor
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
		Penyediaan alat tulis kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
		Penyediaan makanan dan minuman
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
		Penyediaan Cetak Karcis
		Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur
		Pengadaan peralatan gedung kantor
		Pengadaan Komputer
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
		Pemeliharaan computer
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
		Penyusunan laporan barang inventarisasi
		Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD
		Fasilitasi Penyusunan LPT SKPD
		Penyusunan LKJIP
		Penyusunan Dokumen Penilaian Resiko
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
		Pengelolaan/ Pemeliharaan Website
		Fasilitasi Pengelolaan PPID

Meningkatnya Daya Saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil dan kelembagaan koperasi yang berkualitas	Program Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Pengawasan Koperasi Serta Penyusunan NIK dan Orientasi
		Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Koperasi / KUD
		Fasilitasi Penilaian Kesehatan Koperasi
		Monitoring dan Evaluasi Koperasi aktif
		Falidasi data usaha mikro se Kab Karanganyar
		Monitoring penyelesaian piutang ex dana bergulir UKM
		Expo produk UKM dan Pameran INACRAF
		Fasilitasi Hari Ulang Tahun Koperasi di Kabupaten Karanganyar
		Sosialisasi IUMK
Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja	Meningkatnya pelayanan tenaga kerja , calon tenaga kerja	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas , Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pelatihan keterampilan tenaga kerja
		Pembangunan gedung dan sarana prasarana BLK
		Penyebarluasan informasi tenaga kerja
		Surveillance ISO 9001:2015

		Rehabilitasi gedung BLK
		Pengadaan sarana dan prasarana BLK
		Pemberangkatan transmigrasi penduduk asli Kabupaten Karanganyar
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
		Pelatihan produktivitas tenaga kerja
		Pembinaan dan penempatan tenaga kerja
		Skill Development Center (SDC) Kabupaten Karanganyar
		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
		Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
		Pemberdayaan LK Tripartit
		Pembinaan persyaratan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja
		Deteksi dini kerawanan perusahaan
Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan	Program Pengembangan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
		Pembinaan Toko Modern
		Biaya sewa tanah pasar palur
		peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan pasar
		Fasilitasi pelaksanaan metrologi legal
		Monitoring perkembangan harga bahan pokok dan barang strategis

		Monitoring evaluasi intensifikasi pendapatan dan potensi pasar
		Rehabilitasi pasar di Kabupaten Karanganyar
		Pengadaan sarana dan prasarana pasar
		Peningkatan kapasitas SDN petugas pengelola kebersihan dan satpam pasar
		Fasilitasi Pameran
		Fasillitasi sarpras guna peningkatan ekonomi pedagang kaki lima
		Penyuluhan, pemberdayaan dan disiplin PKL dan asongan
		Operasional pengelolaan dan penataan PKL
		Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan Pasar

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar pada menyusun perjanjian kinerja pada tahun 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2020
			Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja	TPAK	74.03
	Meningkatnya pelayanan calon tenaga kerja	Rasio Angkatan Kerja yang bekerja	69.2
2	Meningkatnya pelayanan calon tenaga kerja Meningkatkan kualitas Koperasi UMKMs.	Pertumbuhan usaha mikro	5
	Meningkatnya pengelolaan kelembagaan koperasi yang berkualitas dan pertumbuhan usaha mikro	Koperasi Sehat	39
		Persentase usaha mikro yang dibina	1
3	Meningkatkan produktivitas Sektor Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	1.65

	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik	44.4
		Persentase retribusi dalam PAD	0.93
4	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah	Nilai SAKIP	70
	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah	Nilai IKM	82

Pencapaian kinerja kegiatan semestinya didukung dengan anggaran yang mencukupi. Anggaran belanja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada setiap program adalah sebagai berikut

Tabel 2.4

Rencana Kerja Anggaran pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, UKM

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran
1. Program Penunjang Pemerintah Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peraanngkat Daerah		39.300.000,-
	Penyusunan dokumen perencanaan pengangkatan daerah	3 dokumen	16.800.000
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RSA-SKPD	1 dokumen	5000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan	1 dokumen	4.500.000
	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPPD	1 dokumen	3.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPPD	1 Dokumen	3.000.000
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Relasasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	7.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	17.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		11.252.032.000
	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	11.239.532.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKDP	12 Laporan	12.500.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		10.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan	1 Dokumen	10.000.000

	Laporan Barang Milik Daerah pada SKDP		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		300.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600 orang	300.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		499.599.800
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	20.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	1 Paket	19.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	222.600.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	40.000.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Paket	69.999.800

	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKDP	1 Paket	125.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKDP	1 Paket	3.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		131.000.000
	Pengadaan Mebel	1 Paket	20.000.000
	Pengadaan Mebel dan Mesin Lainnya	1 Paket	51.000.000
	Pengandaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Paket	60.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.562.609.600
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	403.309.600

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174 OrangThl, 50 Satpam, Alat Kebersihan 1 Paket	3.156.3000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		591.901.300
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 paket	257.401.200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Lainnya	1 Paket	50.000.100
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	99.500.000
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Gedung	185.000.000

2.PROGRAM PELATIHAN KERJA dan PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		2.255.840.000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3 Paket untuk Dana DAU 5 paket untuk dana DBHCHT	10.950.000
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	2 RAB	105.840.000
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		51.964.466
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	35 LPKS	51.964.466
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		10.000.000
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	15 Orang	10.000.000

3.PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		1.279.685.300
	Pelayanan Antar Kerja	50 Orang	7.920.000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	50 Orang	6.080.000
	Perluasan Kesempatan Kerja	120 Orang	1.265.685.300
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		45.000.000
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	240 Orang, 1 Paket	45.000.000
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		75.000.000
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	12 Bulan	75.000.000
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam		26.000.000

	1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten /Kota	12 Bulan	26.000.000
4.PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota		25.000.000
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	3 kali sidang, 40 perusahaan	25.000.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan		200.000.000

	Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 orangx8 angkatan	200.000.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		75.000.000
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(Satu) Daerah	40 kasus	25.000.000

	Kabupaten/Kota		
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Triparti Daerah Kabupaten /Kota	3 kali sidang, 40 perusahaan	35.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan capaian kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

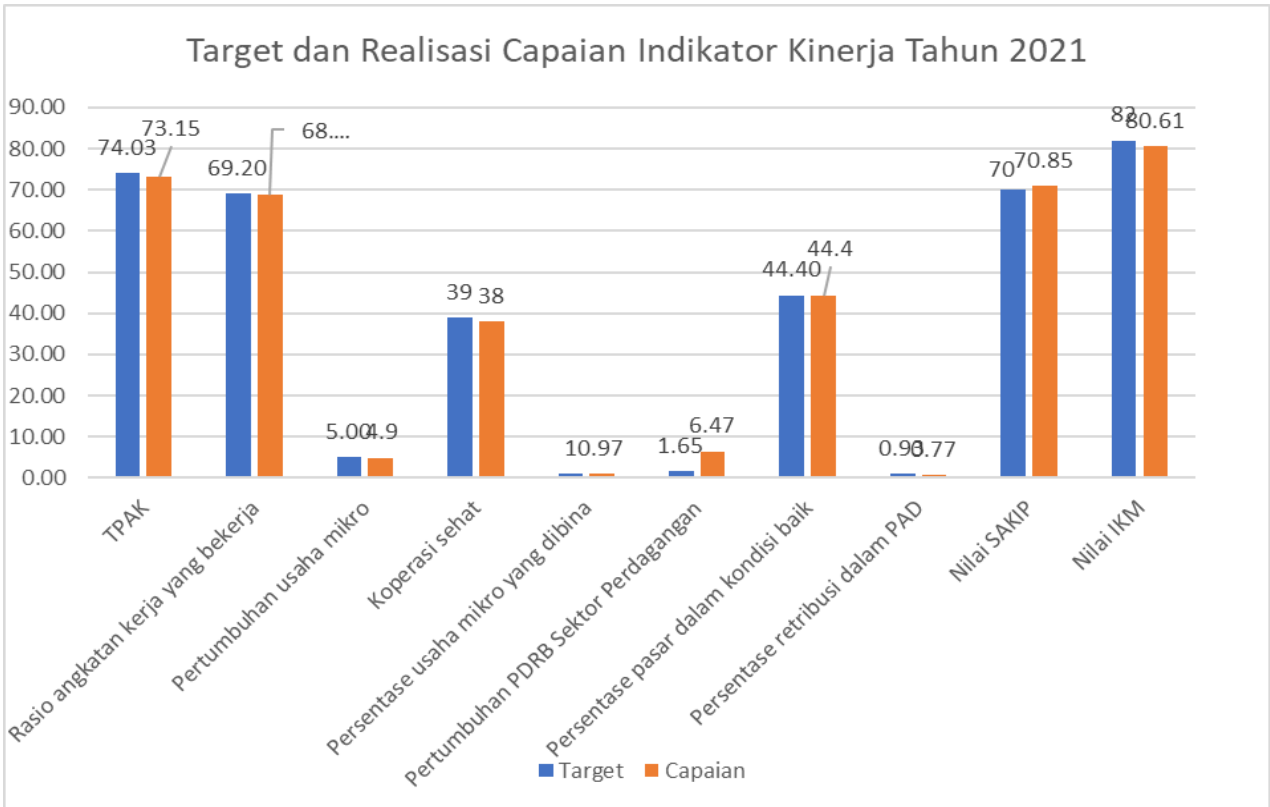
Pengukuran capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 tercantum pada tabel berikut

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Tujuan 1 Meningkatnya Tingkat partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74.03	73.15	98.81
Sasaran 1 Meningkatnya pelayanan calon tenaga kerja	Rasio angkatan kerja yang bekerja	69.20	68.83	99.47
Tujuan 2 Meningkatnya kualitas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	Pertumbuhan Usaha Mikro	5.00	4.9	98.00
Sasaran 2 Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil dan pengelolaan kelembagaan koperasi yang berkualitas.	Koperasi Sehat	39	38	97.44
	Persentase usaha mikro yang dibina	1	0.97	97
Tujuan 3 Meningkatkan produktivitas sector perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	1.65	6,47	392,12
Sasaran 3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik	44.4	44.4	100
	Persentase retribusi perdagangan dalam PAD	0.93	0.77	82.45
Sasaran 4 Meningkatkan kualitas perencanaan,	Nilai SAKIP	70.	70.85	101.21

pengendalian dan evaluasi kinerja bidang				
Tujuan 4 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang	Nilai IKM	82	80.61	98.30

Target dan realisasi Tahun 2021 tertera pada Grafik berikut



Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

a. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran 1

Tujuan 1 : Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan calon tenaga kerja

Tolok ukur capaian tujuan/ sasaran 1, terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu :
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Angkatan Kerja yang Bekerja.

Capaian kinerja indikator sasaran ke 1 dapat diketahui pada tabel berikut

Tabel 3.3

Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan /Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian %	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74.03	73.15	98.81	Baik
2	Rasio angkatan kerja yang bekerja	69.20	68.83	99.47	Baik

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2021 terdapat Pengangguran Terbuka sejumlah 30.517 orang, Angkatan kerja sejumlah 517.787 orang dan bukan Angkatan kerja 190.074 orang. Total Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja adalah 707.861 orang.

Capaian Kinerja indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2021 termasuk dalam kategori **baik**. Tingkat partisipasi Angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah total Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja sehingga diperoleh nilai TPAK sebesar 73.15.

Rasio Angkatan kerja yang bekerja merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan Angkatan kerja yang bekerja. Pada tahun 2021 terdapat 487.270 orang yang bekerja, dan 30.517 orang yang merupakan pengangguran terbuka. Jumlah orang yang bekerja tersebut dibandingkan dengan jumlah orang yang merupakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, sejumlah 707.861. Sehingga rasio Angkatan kerja yang bekerja tahun 2021 adalah 68.83.

Capaian kinerja rasio Angkatan kerja yang bekerja termasuk dalam kategori **baik**

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 adalah sebesar **Rp.4.076.525.300,-** atau **17.70 %** dari total pagu sebesar **Rp.22.908.968.000,-**

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3 adalah sebesar **Rp.3,984.508.196,-** Sehingga dapat efisiensi biaya sebesar **Rp.86.017.104,-** atau **0.37 %**

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 Adalah

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

- a. Pelayanan Antar Kerja
- b. Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja
- c. Perluasan Kesempatan Kerja
- d. Pelayanan penyediaan informasi pasar kerja online
- e. Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran
- f. Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- g. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
- h. Pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota
- i. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
- j. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

- a. Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- b. Penyiapan lingkungan hunian fisik, social, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi
- c. Pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten
- d. Penyuluhan transmigrasi

Dokumentasi kegiatan yang mendukung tujuan / sasaran 1 antara lain sebagai berikut



Gambar 3.2

SOSIALISASI INFORMASI PASAR KERJA



Gambar 3.3
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

3. Program Hubungan Industrial

- a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- b. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota
- c. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/ kota
- d. Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- e. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

b. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran 2

Tujuan : Meningkatkan kualitas koperasi UMKM

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan kelembagaan koperasi yang berkualitas dan pertumbuhan usaha

Tolok ukur capaian Tujuan/ sasaran 2, terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu : Pertumbuhan Usaha Mikro, Koperasi sehat dan persentase usaha mikro yang dibina. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 2 maka dilakukan kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan/ Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian %	
1	Pertumbuhan Usaha Mikro	5.00 %	4.90 %	98 %	Baik
2	Koperasi sehat	39 %	38.83 %	99.56%	Baik
3	Persentase usaha mikro yang dibina	1 %	0.97 %	97 %	Baik

Capaian kinerja pada indikator persentase pertumbuhan Usaha Mikro sebesar 98%. atau kategori **baik**. Dari target 5.0% mencapai 4.9%. pada tahun 2021 tercatat 2.820 dari total 46.965 UMKM. Capaian kinerja pada indikator persentase koperasi sehat 99.56% % atau kategori **baik**. Dari target 39 % mencapai realisasi 38.83%. Jumlah koperasi simpan pinjam pada tahun 2021 sebanyak 104 unit. Terdapat koperasi sehat 40 unit. Sehingga persentase koperasi sehat adalah 38.83%.

Capaian kinerja pada indikator persentase usaha mikro yang dibina adalah 97,% atau kategori **baik**. Dari target 1 % mencapai realisasi 0.97 %. Pada tahun 2021 tercatat 46.965 usaha mikro dan 460 usaha mikro yang berkembang. Perkembangan usaha mikro ini sangat dipengaruhi adanya program bantuan pemerintah berupa BPUM (Bantuan Presiden Untuk Masyarakat) dan Program JPE (Jaring Pengaman Ekonomi) serta program Hibah dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 adalah sebesar **Rp.905.000.000,-** atau 3.95 % dari total pagu sebesar **Rp.22.908.968.000,-**

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian Tujuan/ sasaran adalah sebesar **Rp.802.016.750,-** Sehingga dapat efisiensi biaya sebesar **Rp. 102.983.250,-** atau **0,44 %**

Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tujuan / sasaran 2 adalah

1. Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam

Fasilitasi pemenuhan Izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Koperasi / KUD

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi / kewenangan kabupaten kota

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten kota
- b. Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten kota

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

- a. Pemberdayaan melalui usaha kemitraan usaha mikro
- b. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro
- c. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro

7. Program Pengembangan UMKM

Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi

Dokumentasi kegiatan yang mendukung tujuan / sasaran 2 antara lain sebagai berikut



Gambar. 3.4
Pengawasan Koperasi dan Penyusunan NIK



Gambar 3.5
Fasilitasi Penilaian Kesehatan Koperasi

c. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan Sasaran 3

Tujuan 3 : Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana perdagangan



Tolok ukur capaian Tujuan Sasaran 3 terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu Pertumbuhan PDRB pada sektor perdagangan, Persentase Pasar dalam kondisi baik, dan Persentase retribusi perdagangan dalam Pendapatan Asli Daerah. Capaian indikator Sasaran Strategis 3 pada tahun 2021 tertera pada tabel berikut

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian %	
1	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	1.65	6.47	392.12 %	Sangat Baik
2	Persentase pasar dalam kondisi baik	44.40	44.40	100 %	Baik
3	Persentase retribusi perdagangan dalam PAD	0.93	0.79	84.94 %	Baik

Capaian kinerja Indikator Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perdagangan sebesar 392.12 % atau kategori **sangat baik**. Capaian kinerja Indikator persentase pasar dalam kondisi baik dengan capaian sebesar **100 %** yang dikategorikan **baik** pada tahun 2021. Kemudian Persentase retribusi perdagangan dalam Pendapatan Asli daerah pada tahun 2021 termasuk kategori **Baik**. Dari total PAD Kabupaten Karanganyar tahun 2021 sebesar Rp 426.642.778.471,- Retribusi perdagangan memberi kontribusi sebesar Rp. 3.407.147.023,-. Retribusi sektor perdagangan diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan tera/ tera ulang, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat parkir khusus, retribusi perpanjangan IMTA, dan lain -lain PAD yang sah.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Tujuan / sasaran 3 adalah sebesar **Rp.1.541.000.000,-** atau **6.72%** dari total pagu sebesar **Rp.22.908.968.000,-**

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian Tujuan / sasaran 3 adalah sebesar **Rp.1.512.543.389,-** Sehingga dapat efisiensi biaya sebesar **Rp.28.456.611,- atau 0.12 %**

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tujuan/ sasaran 3 Adalah

1. Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memulai Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan pasar
- c. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- a. Pemantuan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- b. Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi Perdagangan
- c. Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi

4. Program Pengembangan Ekspor

- a. Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten / kota
- b. Pameran dagang lokal

5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang
- b. Pengawasan / penyuluhan metrologi legal

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- a. Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten / kota

- b. Operasional pengelolaan dan penataan PKL
- c. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan Pasar

Dokumentasi kegiatan yang mendukung tujuan / sasaran 2 antara lain sebagai berikut.



Gambar 3.6

Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana Perdagangan Berupa Distribusi Bahan Kebersihan Pasar

d. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang

Tolok ukur capaian sasaran strategis 4, terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu : Nilai SAKIP dan Nilai IKM. Capaian kinerja Sasaran Strategis 4 tertera pada tabel beriku.

Tabel 3.6

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian %	
1	Nilai SAKIP	70.00	70.85	101,21	Sangat Baik
2	Nilai IKM	82,00	80,61	98.30	Baik

Nilai SAKIP pada tahun 2021 adalah 70.85. Nilai SAKIP ini melebihi dari target sebesar 70.00. Capaian kinerja 101.21 % sehingga masuk pada kategori **sangat baik**. Capaian Kinerja Nilai SAKIP merupakan penilaian dari tim review APIP Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan rekomendasi APIP, maka ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditindaklanjuti pada laporan SAKIP 2021.

Nilai Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 sebesar 80,61 Capaian kinerja sebesar 98.30 Sehingga masu pada kategori **baik**.

Nilai Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh masyarakat yang menerima layanan dari Dinas. Unsur dalam Standar Kepuasan Masyarakat meliputi persyaratan, sistem mekanisme prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, penanganan pengaduan saran masukan, sarana prasarana.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 4 adalah sebesar **Rp.16.386.442.700,-** atau **71.52%** dari total pagu sebesar **Rp.22.908.968.000,-**

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 4 adalah sebesar **Rp.16.037.500.158,-** Sehingga dapat efisiensi biaya sebesar **Rp.348.942.542,-** atau **1.52 %**

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 Adalah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktisar Relasasi Kinerja SKPD
 - g. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
 - i. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - j. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - k. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - l. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan

- m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- n. Fasilitas Kunjungan Tamu Fasilitas Kunjungan Tamu
- o. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- p. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- q. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- r. Pengadaan Meubel
- s. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- t. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- u. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- v. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- w. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- x. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
- y. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- z. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- aa. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung / kantor dan bangunan lainnya
- bb. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan 2021

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018 – 2023 telah mengalami perubahan mengingat RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023 yang harus diubah dengan adanya peraturan-peraturan baru.

Ada beberapa indikator tujuan / sasaran yang diubah atau ditambahkan menjadi indikator tujuan/sasaran yang baru yaitu :

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah total Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja. Ini menunjukkan besaran persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Makin tinggi TPAK, maka makin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

b. Koperasi Sehat

Indikator koperasi sehat menunjukkan kondisi perkembangan koperasi yang meliputi kondisi sehat dalam organisasi, sehat dalam usaha serta sehat dalam mental.

c. Persentase usaha mikro yang dibina

Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

d. Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Pertumbuhan Domestik Regional Bruto menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Sektor perdagangan meliputi lapangan usaha dalam perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor.

e. Persentase pasar dalam kondisi baik

Pasar merupakan faktor penting dalam mendukung perekonomian daerah. Terkait hal ini kondisi fasilitas pasar dan sarana pendukung merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendukung fungsi pasar, yaitu penataan bangunan, kantor pengelola, tempat parkir, tempat pembuangan sampah sementara, air bersih, toilet umum, tempat ibadah, pemadam kebakaran.

Perbandingan capaian Indikator kinerja tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja tahun 2020 dan 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2020	2021
Rasio angkatan kerja yang bekerja	%	69.18	68.83
Pertumbuhan usaha mikro	%	3.9	4.9
Persentase retribusi dalam PAD	%	0.90	0.77
Nilai SAKIP	Score	69.18	70.85
Nilai IKM	Score	87.84	80.61

Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 tertera pada grafik berikut.



Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dan 2021

Realisasi rasio angkatan kerja yang berkerja pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Rasio Angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran tentang kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2021 kemampuan penyerapan tenaga kerja lebih rendah.

Pertumbuhan usaha mikro mengalami kenaikan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021, dengan didukung kondisi pemulihan ekonomi maka berdampak munculnya pelaku usaha mikro baru.

Persentase retribusi dalam PAD pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Pada tahun 2021 Retribusi dari Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp. 3.407.147.023,- sedangkan di tahun 2020 sebesar Rp. 3.421.793.748,-. Capaian PAD Kab Karanganyar di tahun 2021 sebesar Rp. 426.642.778.471,- dan di tahun 2020 sebesar Rp. 384. 682.551.684,-

Nilai SAKIP Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020.

Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah telah berusaha meningkatkan kinerja dari semua aspek,walaupun capaian yang dicapai belum maksimal.

Nilai IKM Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 mengalami pnurunan disbanding tahun 2020. Dinas telah melaksanakan berbagai layanan kepada masyarakat, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal. Opd harus memperbaiki administrasi dan layanan dari berbagai aspek.

3. Perbandingan Realisasi capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan Target Tahun 2023 (Target Akhir Rencana Strategis)

Perandingan realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan target di tahun 2023 tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan Target Tahun 2023 (Target Akhir Rencana Strategis)

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target
		2021	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	73.15	73.50
Rasio angkatan kerja yang bekerja	%	68.83	69.20
Pertumbuhan usaha mikro	%	4.9	5
Koperasi sehat	%	38	39
Persentase usaha mikro yang dibina	%	0.97	1
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	6.47	6,47
Persentase pasar dalam kondisi baik	%	44.4	50
Persentase retribusi dalam PAD	%	0.77	80
Nilai SAKIP	Score	70.85	70
Nilai IKM	Score	80.61	82

Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Rasio Angkatan Kerja yang bekerja, pertumbuhan usaha mikro, koperasi sehat, persentase usaha mikro yang dibina, persentase pasar dalam kondisi baik, persentase retribusi dalam PAD, Nilai IKM masih berada di bawah target di tahun 2023. Karena itu Dinas harus lebih melakukan evaluasi dari berbagai aspek dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut agar target di tahun 2023 dapat tercapai

B. Realisasi Anggaran dan Efisiensi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2021, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 24.617.968.000 (Dua puluh empat milyar enam ratus tujuh belas juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Penggunaan anggaran dalam mendukung capaian sasaran strategis dijelaskan pada tabel berikut

Tabel. 3. 9

Anggaran Biaya dalam mendukung Sasaran Strategis Dinas Perdagangan
Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2021

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi
Meningkatkan tingkat partisipasi Angkatan Kerja	Program Hubungan Industrial	300,000,000	298,480,000	1,520,000
Meningkatnya pelayanan tenaga kerja, calon tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	1,425,685,300	1,392,328,337	33,356,963
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,317,804,466	2,266,664,325	51,140,141
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	27,035,534	27,035,534	0
Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM	Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	10,000,000	9,992,000	8,000
Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20,000,000	19,600,000	400,000

	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	10,000,000	9,800,000	200,000
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	375,000,000	272,784,400	102,215,600
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	445,000,000	445,000,000	0
	Program Pengembangan UMKM	45,000,000	44,840,350	159,650
Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan	Program Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	15,000,000	14,882,000	118,000
Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,130,000,000	1,108,428,800	21,571,200
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	13,155,000	12,334,000	821,000
	Program Pengembangan Ekspor	115,949,600	115,309,200	640,400
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	250,010,000	244,763,700	5,246,300
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	16,885,400	16,825,689	59,711

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,386,442,700	16,037,500,158	348,942,542
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah				

Realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 24.051.521.493,- Sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 566.446.507,- atau sebesar 1,8 %

C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Pendapatan Asli Daerah Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan
UKM

		Anggaran	Realisasi	Persentase
--	--	----------	-----------	------------

4	Pendapatan	2.907.298.000	3.407.147.023	117,19%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.907.298.000	3.407.147.023	
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.907.298.000	3.271.569.237	112,53%
4.1.2.02	Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	232.500.000	252.867.700	
4.1.2.05	Retribusi pelayanan pasar		2.193.856.650	
4.1.2.11	Retribusi pelayanan tera ulang		63.882.000	
4.1.2.14	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	305.957.000	412.046.400	
4.1.2.18	Retribusi tempat khusus parkir	292.398.000	292.297.900	
4.1.2.30	Retribusi perpanjangan IMTA	75.000.000	56.518.587	
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah		135.577.786	

Sumber pendapatan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021, antara lain :

a. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan

Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2011, retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/ kebersihan

b. Retribusi pelayanan pasar/

Objek retribusi pelayanan pasar adalah kios dan PKL

c. Retribusi pelayanan tera/ tera ulang

Meliputi retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya

d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah merupakan retribusi yang dipungut atas pemakaian barang milik daerah/kekayaan daerah. Dalam hal ini berupa penyewa tanah dan bangunan MCK, rusunawa, sewa tanah BLK, Pondok Boro, sewa Plaza.

e. Retribusi tempat parkir khusus

f. Retribusi perpanjangan IMTA

Merupakan retribusi perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA

g. Lain-lain PAD yang sah.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021, meliputi 4 (empat) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator sebagai berikut.

1. Capaian kinerja > 100% kategori “sangat baik” sebanyak 2 (dua) indikator sasaran, yaitu Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan Nilai SAKIP
2. Capaian kinerja 75% - 100% kategori “baik” sebanyak 8 (delapan) indikator sasaran, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Rasio Angkatan Kerja yang bekerja, Pertumbuhan Usaha Mikro, Koperasi Sehat, Persentase usaha mikro yang dibina, Persentase pasar dalam kondisi baik, Persentase retribusi perdagangan dalam PAD, dan Nilai IKM.

B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI

1. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja :
 - a. Penciptaan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah
 - b. Peningkatan kinerja industri agar dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja
 - c. Pengembangan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja
 - d. Mendorong terciptanya kesempatan kerja seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan
 - e. Fasilitasi dan pengembangan lembaga kursus/pelatihan tenaga kerja
 - f. Peningkatan peran serikat pekerja dalam fasilitasi perselisihan hubungan industrial
 - g. Peningkatan MOU dengan daerah tujuan transmigrasi lainnya.
 - h. Peningkatan kerja sama dengan daerah tujuan transmigrasi dalam hal penyediaan sarana prasarana di lokasi transmigrasi.
2. Bidang Perdagangan dan Pasar :
 - a. Meningkatkan kelancaran sistem distribusi barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat;
 - b. Peningkatan pemantauan harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari raya dan hari-hari besar keagamaan;

- c. Mengoptimalkan kerjasama kemitraan dalam perdagangan;
 - d. Mengoptimalkan penyiaran dan informasi pasar kepada masyarakat;
 - e. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan ekspor dan impor;
 - f. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial daerah;
 - g. Meningkatkan pengaturan dan pembinaan serta penyediaan tempat usaha bagi PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. Mengoptimalkan pendapat retribusi pasar
 - i. Melakukan revitalisasi dan pemetaan fasilitas perdagangan di pasar daerah
 - j. Menciptakan pasar daerah yang bersih, tertib, nyaman dan aman
 - k. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola pasar daerah
 - l. Melakukan regulasi tarif retribusi pasar
3. Bidang Koperasi dan UKM :
- a. Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan UKM;
 - b. Meningkatkan akses koperasi dan UKM terhadap pembiayaan dan permodalan serta pemasaran;
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap koperasi;
 - d. Meningkatkan kemitraan antar koperasi dan UKM maupun dengan badan usaha lainnya.
 - e. Melakukan pendataan dan pembinaan koperasi sebagai langkah awal untuk melakukan penghapusan koperasi yang tidak aktif sama sekali.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Karanganyar, Januari 2022
Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Karanganyar


MARTADI, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650323 198908 1 001